

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 235/G/2019/PTUN.JKT)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

**HELEN MARLINA
NPM. : 217182003**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU KENOTARIATAN
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 235/G/2019/PTUN.JKT)**

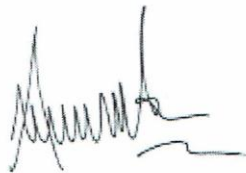
Oleh:

**HELEN MARLINA
NPM. : 217182003**

Telah disetujui untuk melaksanakan Ujian Tesis

Pada tanggal 10 Januari 2022

Pembimbing,



(Dr. Ariawan Gunadi SH., MH.)

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS TELAH DIUJI

Nama : Helen Marlina
NIM : 217182003
Program Peminatan : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Judul Tesis

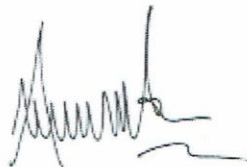
**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN
HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/G/2019/PTUN.JKT)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 25 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
2. Anggota : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



(Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/G/2019/PTUN.JKT).”** Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kenotariatan (M.Kn) pada Program Pascasarjana Universitas Tarumanegara Jakarta Barat.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Yang terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr. Ir Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat.
2. Yang terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr. Mella Ismelina F.R. S.H. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan (M.Kn) Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat;
3. Yang terhormat dan sangat terpelajar DR. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi;
4. Seluruh dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan (M.Kn) Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat;
5. Seluruh staf sekretariat Program Studi Ilmu Kenotariatan (M.Kn) Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat;

6. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, yang telah mendidik, membesarkan dan mencurahkan kasih sayang;
7. Terimakasih yang paling dalam dan teristimewa peneliti juga sampaikan kepada suami dan anak tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, perhatian, motivasi dan doa selama perkuliahan sampai penyelesaian Tesis ini;

Sebagaimana lazimnya seorang yang masih belajar, tentu peneliti masih memerlukan bimbingan dari berbagai pihak, begitu juga dalam penulisan Tesis ini juga masih memerlukan bimbingan dari pihak lain. Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna.

Jakarta, 01 Desember 2021



Helen Marlina

ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak hanya terjadi pada ranah hukum pidana saja namun juga terjadi di ranah hukum perdata. Dalam konteks ini terjadi pada dunia kenotariatan, yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai Notaris. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Notaris X merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik dan kode profesi Notaris, yang dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami dan menganalisa faktor-faktor penyebab Notaris terkena sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, dan akibat hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus yakni mengacu pada Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh kedua Notaris, dan sanksi teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua pelanggaran tersebut disebabkan oleh faktor kelalaian, dan faktor ketidakcermatan dari Terlapor / Terbanding, sehingga Notaris X dikenai sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris, Pembuatan Akta Yayasan, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Unlawful Acts (PMH) do not only occur in the realm of criminal law but also occur in the realm of civil law. In this context, it occurs in the notarial world, which is carried out by someone who is a notary by profession. Unlawful Acts committed by Notary X is a violation of the code of ethics and professional code of the Notary, which is contained and regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. The purpose of this study is to understand and analyze the factors that cause Notaries to be sanctioned by the Notary Central Supervisory Council, and the legal consequences for Notaries who are subject to office sanctions by the Notary Central Supervisory Council. This research method uses a Case Study approach, which refers to Decision Number 235/G/2019/PTUN.JKT. The results showed that there was a violation of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position, and a written warning sanction in accordance with the provisions contained in Article 73 paragraph (2) of the Notary Position Act. The two violations were caused by negligence, and the inaccuracy factor of the Reported Party / Appellate, so that Notary X was subject to an office sanction by the Notary Central Supervisory Council.

Keywords: Notary Responsibilities, Making Foundation Deeds, Unlawful Acts.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
1. Konsep Profesionalisme	13
2. Teori Penjeraan	14
3. Teori Pengawasan	15
4. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	17
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum	27
B. Pengangkatan, Pemberhentian Notaris dan	

	Kewajiban Notaris	56
C.	Kode Etik Notaris	59
D.	Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris	66
E.	Tata Cara Pemanggilan Notaris dalam Kasus Pidana ...	79
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	
A.	Duduk Perkara Putusan Nomor 235/G/2019/ PTUN.JKT	83
B.	Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum	88
C.	Konstruksi Hukum dalam rangka Mencegah Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris	93
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A.	Faktor-faktor Penyebab Notaris Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	103
B.	Akibat Hukum bagi Notaris yang Dikenai Sanksi Jabatan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris	130
C.	Upaya Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Dikenai Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Jabatan oleh MPPN Dalam Rangka Pemulihan Nama Baik Harkat dan Martabat	155

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	179
B.	Saran / Rekomendasi.....	181

DAFTAR PUSTAKA	183
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Surat Izin Penulisan Tesis dan Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Jurnal Layak Terbit
- Lampiran 5 Surat Keterangan Turnitin Tesis
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Keaslian Tesis
- Lampiran 7 Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT